

**FPI dan Demokrasi:**  
**Pandangan FPI tentang Demokrasi dan Pengelolaan**  
**Konflik di FPI**

**Lusi Andriyani, SIP.,M.Si**

Email: lusi.andriyani@umj.ac.id

Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-UMJ dan Mahasiswa Program Doktor  
Ilmu Politik FISIP UI

**Abstrak**

Fenomena globalisasi dan demokrasi di Indonesia telah menumbuhkan gerakan-gerakan yang menampilkan artikulasi yang bervariasi. Sampai menumbuhkan bibit-bibit fundamentalisme. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa pandangan FPI tentang demokrasi serta apa saja penyebab konflik internal dan eksternal ormas dan upaya yang dilakukan ormas di dalam pengelolaan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan FPI tentang demokrasi dan mencari penyebab konflik internal dan eksternal. Outcome yang diharapkan adalah didapatkan faktor-faktor penyebab konflik dan penyelesaian konflik sebagai bagian dari pengelolaan konflik, teridentifikasinya faktor-faktor penyebab konflik dan pola penyelesaian konflik pada ormas serta terpetakannya penyebab konflik dan cara penyelesaiannya. Untuk menganalisis masalah penelitian, digunakan teori yang berkaitan dengan identitas, pengelolaan konflik serta ormas. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan teknik analisis deskriptif eksplanatif. Dari uraian temuan data lapangan dan FGD dapat di peroleh kesimpulan bahwa di FPI sebagai obyek kajian penelitian telah menjawab pertanyaan tentang pandangannya yang berkaitan dengan demokrasi serta penyebab konflik, baik internal maupun eksternal. FPI secara tegas menolak pandangan demokrasi ala barat yang dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lebih mengutamakan

musyawarah. Adapun penyebab konflik internal adalah permasalahan ketidaktaatan anggota terhadap aturan yang dijalankan oleh FPI dan masih ada anggota yang mengabdikan bukan karena Allah. Karena anggota FPI harus mengabdikan diri baik secara finansial maupun fisik. Adapun konflik eksternal terjadi karena kurang responnya masyarakat terhadap kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini memunculkan reaksi dari FPI untuk melakukan tindakan langsung ke lapangan.

*Kata kunci: demokrasi, kelompok, ormas, identitas, konflik.*

### **Pendahuluan**

Di Indonesia fenomena globalisasi justru semakin menumbuhkan gerakan-gerakan yang menampilkan artikulasi yang bervariasi. Menurut Yudi Latif, Islam literal di satu pihak, dan Islam liberal di pihak lain, keduanya adalah anak kandung modernitas yang masing-masing mengandung bibit-bibit fundamentalismenya sendiri (<http://zulfikri.wordpress.com>, 21 Juni 2007). Era reformasi memberikan perubahan wacana pada politik Indonesia. Berkembangnya wacana mengenai demokrasi, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih telah membawa perubahan wacana ideologis ke arah kepentingan-kepentingan praktis. Kebebasan yang ditawarkan pada era reformasi juga semakin memperkuat adanya sentiment keagamaan dan budaya. Aksi-aksi atas nama agama, nasionalis, pluralis serta ideologi lainnya untuk kepentingan golongan tertentu telah mempertegas bahwa selain munculnya variasi partai politik, era reformasi juga memberikan peluang tumbuh suburnya kelompok-kelompok keagamaan, nasionalis dan pluralis.

Sejumlah kelompok masyarakat yang mempunyai sikap sentimen terhadap budaya, etnis, partai maupun agama belakangan ini juga bermunculan seperti munculnya Forum Betawi Rembug (FBR), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam diskursus dan perjalanan demokrasi sering

mengalami benturan identitas dengan komunitas lainnya bahkan tidak jarang terjadi ancaman dan kekerasan dan menjurus pada radikalisme<sup>165</sup>.

Menguatnya sejumlah identitas kelompok yang sedang berkembang dewasa ini beriringan dengan diusungnya ide multikulturalisme sebagai jawaban dari keragaman sebuah identitas kultural, kelompok, agama dan bangsa. Fenomena ini menggambarkan sebuah penegasan baru bahwa konsep multikulturalisme lebih mementingkan adanya identitas kelompok tertentu diatas identitas bersama yang justru akan menjadi ancaman yang serius bagi pembangunan demokrasi. Penegasan tersebut diperjelas dengan semakin maraknya konflik antar ormas yang dibangun atas identitas dan kepentingan masing-masing. Masalah yang akan dijelaskan dalam kajian ini adalah: a) bagaimana pandangan FPI tentang Demokrasi?, b) bagaimana pengelolaan konflik di FPI?.

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, maka digunakan beberapa konsep dan teori. Antara lain: Pertama: konstruksi identitas, konsep ini digunakan untuk dapat memahami bagaimana FPI memandang tentang ide-ide demokrasi yang sedang berkembang. Melalui konstruk identitas dapat dilihat proses terbangunnya pemikiran yang dimiliki oleh FPI, terutama cara pandangny tentang demokrasi. Kedua: Ormas dan Kelompok Kepentingan, teori ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan pola FPI sebagai salah satu ormas Islam dalam mengelola dan menjalankan fungsinya, sehingga dapat dilihat penyebab-penyebab konflik yang ada di FPI, baik konflik internal maupun konflik eksternal.

---

<sup>165</sup> Di Indonesia, radikalisme yang muncul khususnya yang dilabelkan kepada komunitas Islam terutama disebabkan oleh ketidakadilan dan diskriminasi, baik global maupun local. Misalnya kasus Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan yang turun pangkat sementara ketika Soeharto di tugaskan ke Sulawesi selatan. Bagi Kahar itu merupakan ketidakadilan yang terang-terangan. Dan akhirnya bergabung dengan SM Kartosoewirjo dan mendirikan negara Islam sebagai alternative terbaik membangun kedaulatan Indonesia. Tindakan radikalisme juga ditunjukkan dengan sikap Amrozi dan kawan-kawannya yang terlibat kasus peledakan bom di Legian, Kuta, Bali, Hotel JW Marriot, Bom di Kedutaan Besar Australia. Dalam [www.polarhome.com](http://www.polarhome.com); Irfan S. Awwas; "Mencari akar radikalisme merespon ketidakadilan dan diskriminasi".

## Konstruksi Identitas

Identitas menjadi hal penting dalam menjelaskan munculnya ormas-ormas setelah reformasi. Memahami identitas ormas, maka perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana ormas mengkonstruksi identitas tersebut. Konsep identitas lebih mengacu pada aktor sosial, sebagai suatu proses konstruksi makna yang berdasarkan pada atribut budaya, atau serangkaian hubungan dari atribut budaya yang memberikan pemaknaan yang lebih dari sumber makna yang lain. Dimana pluralitas merupakan sumber yang bertolak belakang dengan representasi setiap individu ataupun tindakan sosial. Ini terjadi karena identitas dibedakan dari tradisi, peran sosial dan seperangkat peran lainnya, yang disebut dengan struktur norma dari sebuah institusi dan organisasi masyarakat. Identitas lebih luas dalam mempengaruhi perilaku seseorang tergantung pada negosiasi dari peran individu, institusi dan organisasi. Identitas bersumber dari pemaknaan dari dirinya sendiri dan dirinyalah yang mengkonstruksi melalui proses yang ada pada setiap individu.

Dalam arti yang lebih luas, konstruksi sebuah identitas selalu mengambil tempat dalam konteks pasar dan kekuasaan. Ada tiga bentuk terbangunya identitas (Castells:2002:6-8):

1. *Legitimizing identity*; mengacu pada institusi yang dominan untuk menetapkan dan merasionalisasikan dominasi mereka berhadapan dengan aktor sosial. Hal ini berkaitan dengan kewenangan dan dominasi serta nasionalism.
2. *Resistance identity*; secara umum didominasi oleh aktor yang mempunyai posisi untuk membangun stigma melalui dominasinya, sehingga dapat membangun resistensi dari keberlangsungan prinsip-prinsip dasar yang membedakan, atau yang bertolak belakang dengan institusi yang ada dalam masyarakat.
3. *Project identity*; ketika aktor sosial berdasar pada budaya membangun sebuah identitas baru dan berupaya untuk mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat dengan identitas barunya. Mereka mencoba untuk mentransformasikan struktur sosial. Sebagai contoh, gerakan sosial

yang dilakukan oleh kaum feminis untuk memperjuangkan hak keperempuanannya yang dipandang telah mengalami resistensi karena adanya pola patriarki yang ada dalam keluarga dan masyarakat.

### **Ormas Dan Perwakilan Kepentingan:**

Demikianlah, sejak awal dekade 70-an, secara masif kita menyaksikan kebijakan penyederhanaan partai politik serta pewadahtunggalan berbagai organisasi massa dan profesi, yang secara umum dapat kita istilahkan sebagai kelompok kepentingan. Sekadar beberapa contoh, SPSI dibentuk sebagai wadah bagi kaum pekerja, PWI difungsikan sebagai wadah bagi para jurnalis, dan KNPI didirikan untuk mewadahi aktivisme kalangan pemuda dan seterusnya. Penciptaan format politik dengan cara seperti yang digambarkan di atas secara populer dikenal dengan istilah *corpora-tism*.

Politik korporatis yang terjadi di era Orde Baru adalah upaya pelembagaan saluran kepentingan di bawah supervisi pemerintah. Khusus bagi organisasi politik, basis massa mereka "dipotong" melalui kebijakan massa mengambang. Dengan pola semacam ini pemerintah berharap proses penyaluran kepentingan menjadi lebih "tertib" dan terkendali, sehingga mampu meredam potensi konflik yang dalam jangka panjang dapat mengamankan jalannya pembangunan.

Dilihat dari sisi yang lain, korporatisasi politik terhadap aneka kelompok kepentingan beserta basis konstituennya ternyata juga efektif digunakan untuk memobilisasi dukungan politik bagi pemerintah, sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Telah menjadi rahasia umum bahwa ada semacam instruksi tak tertulis bagi kelompok-kelompok ini untuk menyalurkan aspirasinya kepada kekuatan politik dominan, sehingga ada jaminan bahwa mereka sepenuhnya terkendali.

Sebagai imbalan atas dukungan politik itu, kelompok-kelompok ini diberikan "mandat" untuk bertindak, mengatasnamakan dan "memperjuangkan kepentingan" konstituennya melalui cara dan koridor yang ditentukan sebelumnya oleh pemerintah. Oleh karenanya, secara formal kelompok-kelompok ini memegang monopoli representasi kepentingan. Untuk lebih memperkuat loyalitas kepada pemegang kekuasaan, kepada elite kelompok-kelompok ini melalui jalur

patronase diberikan semacam privilege ekonomi (kesempatan berbisnis) serta posisi politik.

Setiap sistem politik memiliki mekanisme pembuatan kebijakan publik yang memperhatikan aspek keinginan rakyat. Keberadaan Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sesuatu kepentingan akan eksis dengan sendirinya. Eksistensinya bersifat natural karena kepentingan merupakan bagian dari proses hidup manusia. Kepentingan: Minat dan aspirasi individu secara sadar tentang suatu hal yang didasari oleh berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Secara riil kepentingan sangat bervariasi, dapat dilihat dari banyaknya kelompok kepentingan (*Interest Group*) yang muncul. Adanya kelompok kepentingan untuk mengumpulkan kepentingan masyarakat untuk diperjuangkan agar menjadi kebijakan publik yang bermanfaat.

Organisasi masyarakat (Ormas) merupakan kategori kelompok kepentingan *non assiasional*, dimana terbentuknya berdasarkan pada kepentingan etnisitas, daerah, agama, pekerjaan dan pertalian darah/keluarga dan mempunyai kontinuitas yang lebih lama dibandingkan dengan kelompok anomik. Adapun pola tindakan atau kegiatan yang sering dilakukan oleh kelompok ini adalah; Demonstrasi dan tindakan kekerasan, hubungan Pribadi, perwakilan langsung, saluran formal dan institusional lainnya.

### **Ide dan Cara Pandang FPI tentang Kehidupan Berbangsa Bernegara:**

Untuk dapat melihat pandangan FPI tentang demokrasi dan untuk menggambarkan FPI sebagai ormas Islam yang mempunyai nilai-nilai khusus dalam melaksanakan program dan kegiatannya, ada beberapa pokok bahasan yang penting untuk dikaji antara lain: pandangan FPI terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini berkaitan dengan pandangan FPI terhadap ide liberal, syariat islam dan demokrasi serta pandangan FPI tentang konflik dan manajemen konflik. Pandangan-pandangan penting FPI sebagai dasar dari gerakannya yang berkaitan dengan hal diatas antara lain:

#### **FPI, Syariat Islam dan Liberalisme**

Dalam buku yang di tulis oleh Habib Riziq dengan judul "Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam" dijelaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang idirikan oleh Habib Rizieq bersamaan dengan bergulirnya era reformasi tepatnya tanggal 17 Agustus 1998 bersamaan dengan deklarasi mencanangkannya Gerakan Nasional Anti Maksiat. FPI berdiri untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semua program dan kegiatan yyang dijalankan selalu istiqomah untuk memperjuangkan dan membumikan syariat Islam di bumi Indonesia.

Berdasar pada landasan AL-qur'an surat QS. Ash Shaff ayat 8-9 menggambarkan betapa liberalism menjadi musuh besar Islam. FPI memandang bahwa liberalism merupakan pemikiran yang paling berbahaya, yang dapat mematikan nalar dan pikiran serta membunuh iman. Ada beberapa pandangan liberal yang dianggap mematikan nalar, antara lain adalah :

- a. Relativisme; yang memandang semua kebenaran relative tidak pasti, sehingga tidak ada kebenaran mutlak, termasuk kebenaran agama. Hal tersebut memunculkan pandangan pluralism yang menganggap semua agama sama.
- b. Skiptisisme; yang meragukan kebenaran agama dan menolak universalitas dan komprehensivitas agama yang mencakup semua sector kehidupan. Sehingga agama hanya mengatur urusan ritual ibadah saja, tidak lebih.
- c. Agnostisisme; melepaskan diri dari kebenaran agama dan bersikap tidak tahu menahu tentang kebenaran agama, sehingga agama tidak lagi menjadi standar ukuran kebenaran. Hal tersebut memunculkan pandangan tentang materialisme, yang mengukur segala sesuatu dengan materi.
- d. Atheisme; menolak adany, khususnya kebenaran agama dan memandang tuhan hanya sebagai faith identity (identitas kepercayaan) yang menjadi mitos (takhayul) suatu agama yang harus dirumus ulang berdasarkan rasionalitas.

Dari ke empat pandangan ideologi liberal tersebut, semakin jelas bahwa kaum liberalism menurut pandangan FPI merupakan kelompok anarkis pemikir, perusak agama, dan menjadi musuh syariat Islam. Kaum liberal selalu memusuhi

kelompok Islam yang secara istiqomah memperjuangkan penerapan syariat Islam. Kaum liberal juga melakukan fitnah terhadap gerakan Islam istiqomah sebagai preman berjubah, anarkis, radikal, ekstrim dan teroris. Bahkan kaum liberal juga berupaya untuk membubarkan kaum Islam istiqomah. Kaum liberal juga membuat riset dan melaporkan hasil riset tahunan ke Negara Amerika Serikat sebagai Negara yang membiayai kegiatan riset tersebut. Bahkan mereka membuat laporan tahunan. Karena itu liberalism merupakan musuh besar Islam. Dan Islam akan selalu berhadap-hadapan dengan liberal sebagai perang abadi, sebab perang antara yang haq dan yang bathil yang tidak pernah berhenti sampai akhir nanti. Adapun beberapa pandangan FPI berkaitan dengan liberalism:

1. Liberalisme dan alam ghaib: Liberal memandang bahwa semua ayat tentang alam ghaib harus di takwilkan secara metaphor, sehingga sesuai dengan alam materialistic dan sejalan dengan metode ilmiah modern. Dengan kata lain bahwa ayat tentang alam ghaib mesti di rasionalisasikan, karena agama harus sesuai dengan akal. Konsekwensi dari pandangan tersebut adalah bahwa masalah ketuhanan pada akhirnya menjadi mitos juga. Karena justru masalah ketuhanan adalah masalah ghaib yang paling besar, dan mempercayai dan mengimani hal ghaib adalah cirri utama orang beriman. Jika Tuhan sudah dianggap sebagai mitos, maka akan mengantarkan sikap atheis yang anti Tuhan.
2. Liberal dan Fiqh: Fiqh di pandang sebagai belenggu kehidupan dan menfitnahnya sebagai ajaran yang mendiskreditkan agama lain. Bahkan sebagai penyebar kebencian dan kecurigaan terhadap agama lain. Bahkan memandang bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Madinah adalah diskriminatif, eksklusif dan fundamentalistik. Pemikir liberal juga memandang bahwa semua agama sama dan benar, sehingga tidak boleh ada yang mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Dalam pandangan pemikir liberal lainnya yang ada di Indonesia juga disebutkan bahwa agama bukan produk Tuhan, agama adalah penjajah budaya dan pemasang intelektual, mematikan nalar, serta sumber konflik dan pembawa bencana.

- Mereka memandang Islam merupakan sinkretik serta campuran budaya judaisme, kristianisme dan arabisme.
3. Liberal dan syariat Islam: Syariat islam telah di nistakan oleh pemikir liberal dengan pandangannya bahwa syariat Islam hanya menciptakan gerombolan mafia dan anjing-anjing penjilat kekuasaan. Syariat Islam dipandang sangat diskriminatif terhadap perempuan muslim dan non muslim. Syariat islam dipandang sangat utopis dan tirani.
  4. Liberal dan Mu'tazilah: Kaum liberal sering mengklain dirinya pengagum sekaligus pengikut mu'tazilah. Mereka memandang bahwa mereka dan mu'tazilah adalah kelompok yang sangat moderat, karena selalu mengedepankan nalar dan logika yang sehat. Pendapat Mu'tazilah yang memandang Al-Quran adalah mahluk (sebagai ciptaan Alloh) sering dijadikan rujukan oleh kaum liberal untuk menjustifikasi pendapat mereka bahwa alqur'an hanyalah sebuah teks yang merupakan produk budaya, bahasa dan sejarah. Liberal bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah sepanjang zaman tetap mengagungkan al-Qur'an sebagai wahyu Alloh SWT, sedang liberal secara terang-terangan menyerang dan menistakan Al-Qur'an.
  5. Liberal dan *nation Building*: Bangunan kebangsaan yang diusung oleh kaum liberal internasional untuk membangun Negara kebangsaan adalah konsep rasis dan fasis. Yang sangat berbahaya. Rasis lebih mempertahankan ras, suku dan bangsa dalam membangun negara. Fasis dengan pola memusuhi ras dan bangsa yang lain maka cenderung bersikap otoriter terhadap golongan yang dianggap bukan asli bangsanya atau yang dinilai mengancam keutuhan golongan bangsanya. Demokrasi dalam hal ini adalah nama alat politik kaum liberal untuk memasarkan konsep kebangsaan yang rasis dan fasis. Kapitalisme adalah nama alat ekonomi untuk memperkokoh kedudukan suatu rasa tau golongan lainnya. Sosialisme adalah nama alat ekonomi lain kaum liberal untuk mengimbangi kapitalisme yang dikendalikan oleh kaum liberal. Untuk itu *nation building* berbeda dengan sistem Islam yang lintas ras, suku dan bangsa. Dalam sistem islam semua sekat rasis dan fasis di hapuskan.

6. Liberal dan Anti kekerasan: Dengan bersandar pada pandangan bahwa Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, maka kaum liberal mengkampanyekan Islam anti kekerasan. Semua bentuk kekerasan di generalisir sehingga terjadi pembusukan makna. Atas nama Islam anti kekerasan, perlawanan para mujahidin Islam di Philipina, Thailand, Afghanistan, Iraq dan Palestina serta belahan dunia lainnya terhadap nafsu imperialisme barat tidak lagi disebut jihad oleh kaum liberal, melainkan divonis sebagai aksi kekerasan yang bertentangan dengan Islam rahmatan Lil alamin. Nampaknya menurut kaum liberal, perlawanan Mujahidin Islam terhadap kezaliman adalah aksi kekerasan. Liberal telah melakukan pembusukan makna kekerasan secara massif dan sistemik. Semua kekerasan di generalisir sebagai perbuatan yang busuk. Segala bentuk kekerasan dikategorikan sebagai kejahatan dan kekejaman. Akibatnya terjadi kriminalisasi atas nama kekerasan. Kekerasan menurut pandangan Habib Rizieq merupakan cerminan dari dua hal yang saling bertolak belakang. *Pertama*, cerminan dari ketegaran hati dan ketegasan sikap. *Kedua*, cerminan dari kebengisan hati dan kekerasan sikap. Kekerasan sebagai cerminan dari ketegaran hati dan ketegasan sikap merupakan kekerasan terpuji yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sangat dianjurkan dan pada kondisi tertentu diwajibkan seperti dalam alqur'an QS.9 At-TAubah &3 dan QS.66 At-Tahrim 9. Adapun kekerasan sebagai cerminan kebengisan hati dan kekerasan sikap merupakan kekerasan tercela yang dilarang dan diharamkan Islam. Dalam QS. 16 An Nahl 125 dan QS. 3 Ali Imran 159. Kekerasan tercela yang dilarang oleh islam tersebut identik dengan anarkisme. Alloh melarang Rosulullah bersikap keras dalam berdakwah namun Alloh SWT justru memerintahkan dalam QS AT-Taubah 73 dan QS 66 At-Thamrin 9 untuk bersikap keras terhadap kaum kafir dan munafiq. Artinya, antara kedua sikap keras tersebut pasti ada perbedaan, sehiggakeras yang satu dilarang, sedang keras yang lain justru diperintahkan.

## **FPI dan Syariat Islam**

Orang yang beriman pasti meyakini bahwa tidak ada hukum manapun dan dari sisi apapun yang lebih baik dari Hukum Allah SWT. Hukum sipil maupun hukum adat tidak akan bisa menandingi hukum Islam. Fenomena diskriminasi hukum di Indonesia telah membuktikan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia. Kebobrokan hukum di Indonesia bersumber dari kebobrokan sistem hukumnya. Istilah hukum positif bagi hukum sipil memberikan makna lain terhadap hukum selain hukum sipil termasuk hukum Islam. Kepositifan suatu jenis hukum harus mampu menyelesaikan dan menuntaskan suatu permasalahan hukum. Dalam kenyataannya hukum sipil banyak yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas. Untuk itu perlu dibuat komparasi hukum untuk mengetahui kemampuan suatu jenis hukum dalam menuntaskan persoalan hukum. Hukum sipil sendiri menyisakan banyak persoalan di dalam masyarakat antara lain adalah:

- 1) Problem sosial yang dihadapi oleh keluarga korban
- 2) Problem dendam keluarga korban yang tidak tuntas
- 3) Problem pemborosan uang negara, karena negara di bebaskan untuk membangun penjara bagi para pembunuh lengkap dengan sarana dan prasarananya
- 4) Problem efek jera, selama ini penjara tidak efektif membuat jera pelaku pembunuhan.
- 5) Problem rasa aman masyarakat, karena pembunuh yang tidak jera.

Dari permasalahan yang muncul maka dapat dilihat bahwa hukum sipil tidak menuntaskan masalah, bahkan menyisakan banyak persoalan dan melahirkan permasalahan baru di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan hukum Islam tidak pernah menyisakan persoalan dan tidak melahirkan problem baru di tengah kehidupan masyarakat, bahkan menjadi hukum yang efektif dan solutif. Hal ini dikarenakan :

- 1) Hukum Islam memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk mendapat denda jiwa (*Diyat*).

- 2) Hukum Islam memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk membalas dendam dengan cara elegan dan terhormat sehingga tidak memunculkan dendam baru.
- 3) Menghemat pengeluaran negara karena tidak perlu lagi membangun penjara.
- 4) Menciptakan efek jera yang meluas
- 5) Menjamin rasa aman masyarakat

Dengan uraian diatas, tampak jelas bahwa hukum sipil tidak layak sebagai hukum positif. Karena mengakibatkan banyak hal yang negatif, seperti problem sosial, pewarisan dendam, pemborosan uang negara, tidak ada efek jera, dan tidak ada menjamin rasa aman masyarakat. Selain itu hukum sipil tidak memiliki manfaat agama seperti pengampunan dan keberkahan, bahkan sebaliknya hanya menambah dosa dan menghilangkan keberkahan, sehingga membuat negara menjadi rusak. Adapun hukum Islam mempunyai kejelasan manfaatnya dan sangat solutif, efektif dan produktif. Untuk itu standar kemampuan suatu jenis hukum dalam menuntaskan persoalan hukum, maka hukum Islam sepatutnya diformalisasikan sebagai UU Negara Republik Indonesia.

### **Pandangan FPI tentang Demokrasi**

Perkembangan ide demokrasi mendapat tanggapan dari FPI. FPI melihat bahwa selama ini sistem demokrasi hanya melahirkan diktator-diktator dunia, dan menghasilkan koruptor kelas kakap bahkan menciptakan kapitalis-kapitalis internasional yang rakus dan serakah. Sistem demokrasi dipandang sebagai sumber problem yang banyak melahirkan gerombolan mafia dan generasi oportunistis. Hal tersebut karena sistem demokrasi merupakan pintu masuk bagi kaum kapitalis untuk meraih kekuasaan. Adanya *one man one vote* dalam sistem demokrasi telah memberi peluang bagi kaum borjuis untuk membeli suara rakyat.

Musyawarah dan mufakat dalam sistem demokrasi hanya merupakan omong kosong. Karena inti demokrasi adalah suara terbanyak bukan musyawarah

mufakat. Selain itu musyawarah dalam demokrasi bisa menghalalkan yang haram, dan bias pula mengharamkan yang halal. Yang terpenting tergantung suara terbanyak.

Antara sistem demokrasi dan sistem Islam memiliki perbedaan yang sangat besar dan mendasar serta fundamental antara lain :

- a) Sistem Islam liberal berasal dari sumber Ilahi karena datang dari wahyu Allah yang maha agung dan maha suci sehingga sangat sempurna.
- b) Dalam system Islam wajib digunakan hukum Allah SWT.
- c) Sistem Islam tidak dipisahkan antara agama dan negara sedang dalam sistem demokrasi di pisahkan antara agama dan negara sedang dalam system demokrasi dipisahkan antara agama dan negara. Karenanya Islam menolak pemahaman sekuler dan segala bentuk sekulerisasi dalam berbangsa dan bernegara.
- d) Dalam sistem Islam standar kebenaran adalah akal sehat yang berlandaskan syariat sedang dalam sistem demokrasi standar kebenaran adalah akal sakit yang berlandaskan hawa nafsu kelompok terbanyak.
- e) Dalam sistem Islam tidak sama antara suara ulama dengan suara awam, antara suara orang sholeh dengan suara orang jahat. Sedangkan dalam sistem demokrasi suara semua orang sama ulama dan koruptor, guru dan lainnya tidak ada beda nilai suaranya. Untuk itu dalam sistem Islam hanya orang baik yang dimintai pendapatnya dan dinilai suaranya.
- f) Musyawarah dalam sistem Islam hanya menghaqkan yang haq dan membathilkan yang bathil, sedang dalam sistem demokrasi boleh menghaqkan yang bathil dan membathilkan yang haq.
- g) Asal usul sistem Islam sudah dimulai sejak Zaman Nabi Adam AS, karena sejak Alloh SWT menciptakan Adam AS sudah dinyatakan sebagai kholifah diatas muka bumi.
- h) Sistem Islam telah membuktikan diri sebagai sistem terbaik yang adil, jujur dan amanah sepanjang kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin serta berhasil mengantarkan umat Islam menjadi umat yang terbaik.

mufakat. Selain itu musyawarah dalam demokrasi bisa menghalalkan yang haram, dan bias pula mengharamkan yang halal. Yang terpenting tergantung suara terbanyak.

Antara sistem demokrasi dan sistem Islam memiliki perbedaan yang sangat besar dan mendasar serta fundamental antara lain :

- a) Sistem Islam liberal berasal dari sumber Ilahi karena datang dari wahyu Allah yang maha agung dan maha suci sehingga sangat sempurna.
- b) Dalam system Islam wajib digunakan hukum Allah SWT.
- c) Sistem Islam tidak dipisahkan antara agama dan negara sedang dalam sistem demokrasi di pisahkan antara agama dan negara sedang dalam system demokrasi dipisahkan antara agama dan negara. Karenanya Islam menolak pemahaman sekuler dan segala bentuk sekulerisasi dalam berbangsa dan bernegara.
- d) Dalam sistem Islam standar kebenaran adalah akal sehat yang berlandaskan syariat sedang dalam sistem demokrasi standar kebenaran adalah akal sakit yang berlandaskan hawa nafsu kelompok terbanyak.
- e) Dalam sistem Islam tidak sama antara suara ulama dengan suara awam, antara suara orang sholeh dengan suara orang jahat. Sedangkan dalam sistem demokrasi suara semua orang sama ulama dan koruptor, guru dan lainnya tidak ada beda nilai suaranya. Untuk itu dalam sistem Islam hanya orang baik yang dimintai pendapatnya dan dinilai suaranya.
- f) Musyawarah dalam sistem Islam hanya menghaqkan yang haq dan membathilkan yang bathil, sedang dalam sistem demokrasi boleh menghaqkan yang bathil dan membathilkan yang haq.
- g) Asal usul sistem Islam sudah dimulai sejak Zaman Nabi Adam AS, karena sejak Alloh SWT menciptakan Adam AS sudah dinyatakan sebagai kholifah diatas muka bumi.
- h) Sistem Islam telah membuktikan diri sebagai sistem terbaik yang adil, jujur dan amanah sepanjang kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin serta berhasil mengantarkan umat Islam menjadi umat yang terbaik.

- i) Sistem Islam adalah bagian dari kewajiban agama, sehingga penerapannya mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT.

### **Pentingnya Syari'at Islam**

Sejak manusia di ciptakan, kewajiban aslinya adalah ibadah kepada Alloh SWT. Dan syariat merupakan aturan main yang di turunkan kepada manusia. Syariat sendiri secara etimologis artinya aturan hidup yang di turunkan oleh Alloh SWT bagi manusia yang terkait dengan aqidah, hukum maupun akhlaq. Untuk itu dalam konteks hukum, syariat merupakan hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang dibagi atas empat hal :

- a) Ahkamul fardi yaitu hukum syariat perorangan, seperti pengucapan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dsb.
- b) Ahkamul Usroh yaitu hukum syariat rumah tangga, seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua dan anak, masalah nafkah, wasiat dan waris.
- c) Ahkamul Mujtama' yaitu hukum syariat social ekonomi kemasyarakatan, seperti pendidikan, ekonomi, asuransi, perbankan, tradisi, budaya, adat istiadat dan masalah mu'amalat lainnya.
- d) Ahkamud daulah yaitu hukum syariat tata negara, seperti syarat kepala negara, tata cara penetapan kepala negara, hak dan kewajiban kepala negara dan rakyat, pertahanan dan keamanan.

### **Penerapan Syari'ah**

Pendiri bangsa telah memulainya sejak tanggal 22 Juni 1945 dengan konsensus nasional (Piagam Jakarta). Yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah sebenarnya pancasila asli yang paling autentik yaitu pancasila yang berintikan tauhid dan syariah. Untuk itu pancasila sebagai dasar negara harus dijiwai oleh piagam Jakarta yang berintikan tauhid dan syariah sehingga menjadi landasan konstitusional untuk penerapan syariat Islam di negara kesatuan republic Indonesia.

Berdasarkan pada sejarah terbangunnya Indonesia dengan rumusan pancasila tersebut diatas, maka peluang penerapan syariat islam semakin hari semakin terbuka lebar. Peluang untuk menerapkan syariat islam telah ada di tangan umat islam. Untuk itu Habib Rizieq sebagai pendiri FPI dan penulis buku "Hancurkan Liberalisme dan Tegakkan Syariat Islam" mengajak umat islam untuk melakukan langkah-langkah konkrit, antara lain :

- a) *Terkait dengan hukum syariat perorangan, maka mantapkan Iman, Islam dan Ihsan dalam pengalaman, karena itulah pembuka pintu keberkahan dan kemenangan perjuangan penegakkan syariat Islam.*
- b) *Terkait hukum syariat rumah tangga, maka laksanakan perkawinan dan perceraian dalam cara islam, penuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga sesuai syariat islam, termasuk masalah warisan dan lainnya.*
- c) *Terkait hukum syariat ekonomi kemasyarakatan, maka soal pendidikan, kembangkan pendidikan islam, masukkan anak-anak kaum muslimin ke pesantren dan madrasah serta sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum khas islam. Dan soal ekonomi, lakukan semua kegiatan ekonomi dan transaksi ekonomi dengan system ekonomi islam. Soal budaya mempertahankan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat islam.*
- d) *Terkait hukum syariat tata negara, harus terus menerus diperjuangkan melalui koridor konstitusi baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti pada hukuman qishas dan hudud.*

### **Khilafah Islamiyah**

Banyak fenomena yang mendeskreditkan orang islam selama ini, terutama stigma stigma yang menjadikan masyarakat phobia terhadap Islam. Maka sudah saatnya sekarang ini masyarakat islam bersatu membangun masyarakat islam internasional sebagai tandingan dari masyarakat internasional ala zionis. Dunia islam harus mampu menghapus sekat yang telah memisahkan masyarakat islam selama berabad-abad. Adapun langkah konkrit yang harus di tempuh adalah :

- a) Membentuk parlemen bersama dunia Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh Islam yang kredibel dan representative mewakili negeri-negeri Islam dari mana mereka berasal.
- b) Mendirikan bank dunia Islam yang bersih dari segala bentuk ekonomi riba maupun praktek perbankan yang eksploitatif dan kapitalitatif.
- c) Menyatukan mata uang sekluruh dunia Islam dan menjadikannya sebagai alat tukar wajib bagi negara manapun yang berhubungan dagang atau bisnis dengan dunia Islam.
- d) Membentuk masyarakat ekonomi Islam yang menjadi forum kerjasama ekonomi sekaligus sebagai benteng proteksi bagi semua produk dan komoditi Islam dari ancaman pasar bebas masyarakat internasional.
- e) Membangun pakta pertahanan Islam yang menjadi wadah kerjasama di bidang militer, strategi, persenjataan dan pertahanan antar dunia Islam, sekaligus menjadi polisi dunia yang siap melawan segala bentuk kezaliman dan kejahatan kemanusiaan untuk menciptakan kedamaian dunia seutuhnya.
- f) Membangun pusat antariksa Islam yang mengatur sendiri komunikasi dan informasi satelit dunia Islam, serta memproteck negeri-negeri Islam dari segala bentuk penyadapan, penyusupan dan invasi gelombang komunikasi dan informasi yang dilakukan musuh Islam.
- g) Menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi dunia Islam dan menjadikannya sebagai kurikulum wajib bagi setiap sekolah diseluruh negeri Islam pada tiap jenjangnya.
- h) Setiap muslim bebas keluar masuk ke negara Islam manapun yang diinginkannya tanpa proses kemigrasian yang rumit dan melelahkan. Dan setiap negara Islam mempermudah proses asimilasi antar warga negara Islam.
- i) Membangun pusat nuklir Islam bagi pengembangan program nuklir dunia Islam untuk perdamaian dan kedamaian.
- j) Menjadikan Mekkah dan Madinah sebagai kota suci internasional yang lepas dari kekuasaan politik pihak manapun, sekaligus sebagai pusat

peradaban Islam yang seluruh negara Islam ikut andil dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangannya.

### **Aktifitas FPI dalam Dakwah Nahi Munkar dan Pengelolaan Konflik**

Analisa data dari beberapa review dokumen dan hasil FGD yang didapat dari narasumber utama yaitu ketua FPI Wilayah Tangerang Selatan, ditemukan bahwa pola pengelolaan konflik FPI dibagi menjadi dua kategori yaitu pengelolaan konflik internal dan konflik eksternal. Adapun konflik internal akan selalu ada sepanjang FPI berdiri sampai hari kiāmat selama para laskar FPI baik anggota, pengurus maupun pimpinannya berjuang tidak karena Allah SWT akan berkonflik dengan yang berjuang karena Allah SWT. Sedangkan Konflik eksternal dalam konsep perjuangan FPI yaitu adanya benturan prinsip antara haq dan bathil, dan konflik ini akan terus terjadi dan abadi sepanjang waktu. FPI tidak akan berbicara masalah *furu'iyah* yang menimbulkan perdebatan dan tafsiran cukup luas yang berpotensi konflik eksternal dengan ormas Islam lainnya.

Dalam konsep demokrasi jelas dan nyata FPI menolak demokrasi, keyakinan FPI bahwa demokrasi bukan dari “kita” atau bukan dari ajaran Islam sedangkan secara de facto masyarakat Indonesia mayoritas Islam. FPI menolak demokrasi karena menganggap tidak ada dalam konstitusi Negara RI. Bahkan Sila ke - 4 dari Pancasila pun menyebutkan bahwa Indonesia Negara permusyawaratan dan bukan Negara demokrasi. Hal ini kontradiksi dengan judul penelitian yang mengkorelasikan upaya pengelolaan konflik ormas Islam dengan demokrasi.

Eksistensi FPI selalu menjadi sorotan publik karena selama ini FPI selalu menjadi harga mahal bagi media dalam pemberitaannya. FPI di bidik habis oleh media massa dan kelemahan FPI idak memiliki juru bicara resmi untuk melawan pemberitaan media yang negative terhadap aktifitas FPI. Pemberitaan di media massa tentang FPI tidak pernah menonjolkan sisi dakwahnya, yang lebih di sorot masalah nahi munkarnya yang anarkis dan destruktif. Padahal FPI telah banyak melakukan dakwah yang prefentif dan humanis, seperti dialog dan dakwan

terhadap orang Ahmadiyah yang banyak sudah masuk islam kembali di daerah Bogor.

Dalam aktifitas *nahi munkar* FPI punya prosedur standard yang dipegang oleh seluruh aktivis atau lascar. Misalkan untuk menghancurkan tempat pelacuran memerlukan waktu tiga tahun melalui proses dan prosedur yang ada di FPI. Ada 10 langkah prosedur dalam memutuskan suatu tindakan *nahi munkar* diantaranya ketika ada laporan masuk dalam bentuk pengaduan masyarakat maupun pengaduan aktifis FPI, baik aktif maupun pasif (aktif secara resmi tertulis, pasif laporan masyarakat; secara resmi tertulis) maka dibutuhkan upaya berikutnya yaitu pengecekan ulang (*tabayyun*) terkait informasi tersebut. Misalkan didaerah Parung, Bogor disinyalir ada tempat-tempat maksiat, ketika masyarakat parung tidak ada laporan maka FPI tidak ikut campur. Namun saat Ahmadiyah diserang, itu ada laporan dari masyarakat dan hasil pemetakan masalah /wilayah, ada hisbah nahi munkar dan wilayah dakwah maka FPI bertindak disana.

Namun pemberitaan terhadap FPI oleh media disayangkan oleh pimpinan FPI karena cenderung tidak berimbang. Media hanya mengekspose pemberitaan negative dari FPI, sedangkan yang positif ditutup-tutupi oleh media sehingga banyak masyarakat hanya menjadi korban pemberitaan media yang cenderung tidak berimbang tersebut. Ada beberapa kegiatan yang standard dan prosedural yang dilakukan oleh FPI tidak pernah diangkat. Contohnya ketika terjadi Tsunami di Aceh, ada lascar FPI yang diturunkan selama 9 bulan menolong dari awal sampai menguburkan mereka (para korban) yang jumlahnya kurang lebih 100 ribu korban yang dievakuasi oleh relawan. Kegiatan lain yaitu ikut berpartisipasi membangun masjid untuk masyarakat Aceh. Semua aktifitas positif FPI tersebut luput dari pemberitaan media massa.

### **FPI dan Manajemen Konflik**

FPI mempunyai pola organisasi yang sangat unik. Pola manajemen organisasi FPI berkiblat pada Muhammadiyah yang diakui sebagai ormas dengan manajemen yang bagus di Indonesia, adapun manajemen dzikir menggunakan

pola NU dan manajemen gerakan menggunakan pola PPI. Hal ini disampaikan oleh Misbakhul Anam pada saat FGD :

“.....Seluruh Indonesia yang bagus manajemennya adalah Muhammadiyah, itu yang saya pakai. Kemudian manajemen Dzikir saya pakai NU, model pergerakannya saya pake PII, sehingga FPI memadukan suatu sistem didalamnya, FPI tidak pernah berbicara persoalan yang kecil, anda mau shalat pakai kunut atau tidaknya yang penting shalat subuh, kami butuhnya pergerakan bagai mana Islam dan penerapan syariat Islam” (sumber FGD, Senin 9 September 2013).

Dalam menjalankan organisasinya, FPI melakukan disiplin yang sangat ketat terhadap anggotanya untuk tidak menyimpang terhadap syari'at Islam. Apabila ada anggota yang melanggar syari'at Islam akan diturunkan dan di keluarkan dari keanggotaan FPI.

“ Di FPI itu ketat karena apabila ada pelanggaran syara iru akan di turunkan, apalagi bahwa dia menerima upeti dari tempat-tempat haram, maka kita akan kita proses dan akan langsung organisasinya akan dibekukan apabila uang itu sudah masuk ke organisasi” (FG, 9 september 2013).

Upaya yang dilakukan sebagai pola untuk meminimalisir konflik yaitu dengan: Peringatan, dikeluarkan dari anggota, di bekukan. FPI memandang bahwa konflik itu sebagai hal yang serba hadir dan terjadi sampai kiamat. karena sepanjang FPI berdiri sampai nanti hari kiamat, tetap ada konflik.

Konflik di FPI sebagai organisasi masyarakat terbagi atas:

a. Konflik internal di pengurusan FPI

Konflik ini terjadi didasarkan pada miat dan pandangan dari anggota secara personal dimana apapun yang dilakukan harus karena Alloh. Anggota yang tidak menjalankan fungsi keanggotaan FPI karena Alloh akan dapat memunculkan konflik. hal tersebut di sebabkan karena organisasi FPI tidak

sebagai lembaga profit, melainkan lembaga yang butuh dukungan penuh dari anggota untuk mengembangkannya baik fisik, maupun dana.

“yang tidak lillah pasti akan ada konflik, karena FPI itu suatu organisasi yang tidak mempunyai dana dari manapun kecuali sesama anggota, jadi pengurus FPI berarti menandatangani untuk berkorban harta dan waktu yang dimiliki, contoh: ada yang dari purwakarta gara-gara jadi pengurus FPI jd jatuh miskin, karena harta yang dimiliki itu diperuntukan untuk kepentingan FPI, jadi jangan mimpi jadi anggota FPI itu akan kaya. Itu sudah dari awalnya. Jadi konflik internal itu ada, yang berjuang tidak karena allah dengan yang tidak karna allah pasti ada konflik. Karena di FPI mempunyai prinsip, baik di depan, belakang itu tetap sama” (FGD, 9 September 2013)

Ada beberapa kriteria anggota yang berhak menjadi pengurus FPI diantaranya

1. alif amil
  2. Menguasai ilmu usul dan fulu
  3. Menguasai ilmu hadist dan tafsir
  4. Menguasai hadist dan misfalahul hadist
  5. Aktif berbahasa arab.
  6. Siap dipenjara karena mempertahankan kebenaran
  7. Siap mati untuk mempertahankan keberadaan umat
- b. Konflik eksternal

Dalam pandangan FPI tidak ada kompromi terhadap hak dan batil (kebenaran dan kebatilan). Di dalam konsep perjuangan FPI, bahwa **Hak** dan **Batil** adalah *Perang Abadi*. Tidak ada kompromi antara hak dan batil, itu abadi sepanjang waktu” ( FGD, 9 September 2013). FPI menilai bahwa media juga berperan menentukan isu, dimana pada saat FPI menjalankan aksinya untuk melawan kebatilan selalu di siarkan dan ditayangkan.

“ pokoknya apabila FPI damai tidak ada di berita. Tapi kalau FPI konflik itu di tayangkan, seperti halnya penayangan di jawa tengah di kendal itu yang ditayangkan 5 tahun yang lalu di tayangkannya, ini sehingga kita

langsung mengadukan kepada komisi penyiaran itu 5 media elektronik dan 15 media cetak, data dan buktinya ada. Ileh karenanya, karena ini akan diharapkan akan menjadi suatu rujukan yang objektif dan ilmiah yasa memaparkan secara objektif dan ilmiah, tidak ada yang di tutupi” (FGD, 9 September 2013).

Dalam menangani kebatilan FPI mempunyai prosedur standar. Media mempunyai peran signifikan untuk membangun isu dan opini seperti yang telah di gambarkan dalam bukudengan judul “kedzaliman media masa terhadap umat islam” penulisnya M. Fadillah Zein.

“ Dimana Ormas-Ormas Islam semuanya di dzolimi oleh media karena dibelakang media, itu semuanya salibis. Jadi media mana yang tidak dimiliki oleh Yahudi/Nasrani. Kelemahan umat islam hanya tidak mempunyai media, jadi untuk masalah opini mereka menang, siapa yang menguasai media dialah yang akan menang dalam dunia politik. Dan dia paparkan satu-satunya ormas yang dibidik abis dengan penuh kedzaliman itu FPI. Justru yang berbicara dari luar, disini ada yang menarik kenapa sih FPI, NU saja memusuhi, padahal tokoh-tokoh FPI itu lebih dominan dari NU, kalau dari Muhammadiyah tidak sebanyak dari NU.Oleh karenanya di FPI mempunyai prosedur standar, ini yang di pegang oleh seluruh aktifis.” (FGD, 9 September 2013).

Ada 10 langkah sebagai standar dari FPI untuk melaksanakan kegiatan nahi munkar antara lain:

1. Menerima laporan masyarakat dan anggota secara tertulis.
2. Melaporkan laporan masuk secara resmi tertulis.
3. Pengelolaan informasi yang masuk
4. Melakukan investigasi lapangan
5. Menggabungkan data yang masuk
6. Melakukan pemetaan wilayah dan masalah
7. Melakukan pendekatan kepada masyarakat

8. Membuat laporan kepada aparat
9. Melakukan peninjauan laporan secara kontinu kalau tidak ada tanggapan maka
10. Melakukan aksi lapangan.

“ Contoh: di parung di depan kantor polisi saja sudah bukan rahasia lagi itu ada yang mejeng, itu pelacuran di depan kantor polisi, namun polisi tidak mengusir atau yang lainnya, apa bagi hasil atau yang lainnya, itu kurang faham. Masyarakat parung itu tidak ada laporan, berarti mereka nyaman dengan persoalan itu, tidak ada laporan, tidak ada masalah dan FPI pun tidak mau ikut campur. Dan ketika pada saat diparung ada ahmadiyah itu, masyarakat lapor dengan bukti, lalu FPI turun kemasyarakat mempertanyakan masyarakat dengan Ahmadiyah ini bagai mana? Jawaban dari masyarakat menolak, masyarakat tidak setuju, namun mereka di becup oleh aparat, laporan yang masuk kita kelola secara investigasi dan data-data kita gabungkan, lalu kita adakan satu pemetaan berarti wilayah ini adalah bukan wilayah *Dakwah*, tetapi wilayah *Hisbah*. “ (FGD, 9 September 2013).

Dari gambaran diatas, sudah jelas bahwa FPI mempunyai prosedur baku untuk melaksanakan tindakan lapangan.

“ Jadi prosedural standar FPI itu sudah baku, dan belum pernah media mengangkat yang sesuai standar. Yang menarik FPI itu lebih menonjol naahi munkarnya, dari pada dakwahnya, padahal dakwahnya lebih dominan “*Da’ayatu Da’watan*” mengajak dengan lemah lembut, santun, harus simpati.” (FGD, 9 September 2013)

Keluar persoalan prosedural standar FPI, FPI menolak Demokrasi dengan alasan :

- a. Demokrasi berasal dari barat bukan dari Islam
- b. Tidak ada landasan negara Indonesia itu negara demokrasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Awwas,S. Irfan :Internet: Mencari akar radikalisme merespon ketidakadilan dan diskriminasi. [www.polarhome.com](http://www.polarhome.com).
- Anthony Appiah,Kwame,(2006):Internet: *The Politics of identity, Daedalus; Fall 2006;135;Academic Research Library.pg.15*
- A.Almond,Gabriel, (1990), Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara, Penerjemah Sahat Simamora, Jakarta, Bumi Aksara
- Castells, Manuel,(2002), *The Power of Identity: Second Edition*, Balckweell Publishing, Australia
- Esposito, John L., (1999), Dialektika Peradaban: Modernisme Politik dan Budaya diakhir Abad 20,Yogyakarta, Qalam.
- Esposito,John L, (1986), Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik, Jakarta, Bulan Bintang.
- Faturrahman,Deden, (2002), Pengantar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang press
- Heywood,Andrew,(1997), Politics, Bath, Great Britain
- Kenny,Michel,(2004) *The Politics of Identity*, Cambridge, Polity press
- Latif,Yudi, (12:06:2007):Internet: Yudi Latif, Mewujudkan Misi Politik Profetik Agama Publik Melampaui Pemikiran Islam Liberal, diakses tanggal 21 Nopember 2007, <http://zulfikri.wordpress.com>.
- Liddle,William;(25:08:2000)Internet:Pemilihan Presiden dan Primordialisme diakses pada Senin, 17 Maret 2008  
[www.tempointeraktif.com/harian/kolom/25082000-html](http://www.tempointeraktif.com/harian/kolom/25082000-html).
- Mirriam , (1997),Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia,Jakarta.
- Meyer, Thomas, (2004), *Politics of Identity: The Challenge of Modern Fundamentalism*, Federich Elbert Stiftung
- Mustafa, (04:09:2006): Internet : Mustafa, Politik Identitas Dalam Perang Libanon-Israel,  
[www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1119](http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1119)

Surbakti, Ramlan (1992), Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia

\_\_\_\_\_, Internet, *identity politics*, diakses pada tanggal 11 Januari 2007

[http://en-wikipedia.org/wiki/identity\\_politics](http://en-wikipedia.org/wiki/identity_politics)